



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. HAMLY, S.E

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- 3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

- 7 Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
- 8 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 9 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 10 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 11 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- 12 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
- 13 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
- 14 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 15 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 16 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
- 17 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 18 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
- 20 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 21 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.



H. HAMLY, S.E
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196404091988031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100

13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
25	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6

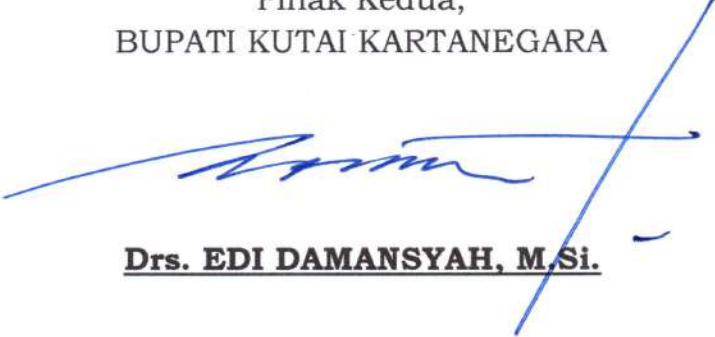
35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

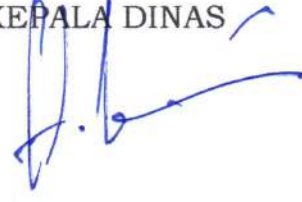
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.814.000.000	APBD
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.050.000.000	APBD
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.450.000.000	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.437.197.857	APBD
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.886.340.000	APBD
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.859.089.590	APBD
JUMLAH ANGGARAN		44.596.627.447	

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


H. HAMLY, S.E
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196404091988031013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. HAMLY, SE**
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT);
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

7. Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
8. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
10. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
12. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
13. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
14. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
17. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
18. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 11 Januari 2024

**Pihak Kedua,
KEPALA,**

H. HAMLY. SE
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196404091988031013

**Pihak Pertama,
SEKRETARIS,**

DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang dipersiapkan dan disampaikan atas pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja kegiatan	Dokumen	38
4	Tersedianya Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial	Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial	Laporan	20
5	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4
6	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	Dokumen	2
7	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8
8	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100

	Daerah			
9	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12
10	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset Pada Dinas Sosial	Persentase Barang Milik Daerah / Asset Pada Dinas Sosial yang terpelihara	Persen	100
11	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
12	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
14	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
15	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100

16	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
17	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Kegiatan	4
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
19	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
20	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
21	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100

	Lanjut (RTL) Perangkat Daerah			
22	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pemerintah	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
23	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1
24	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
25	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
26	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
27	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
28	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
29	Maturitas Sistem Pengendalian	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

	Intern Pemerintah (SPIP)			
30	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
32	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
33	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
34	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
35	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
36	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat fungsional, pelaksana perangkat daerah struktural, dan	Persen	100
37	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1

38	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
39	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
40	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal Persen 100 1,5% - 3,5%	Persen	100
41	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
42	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
43	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
44	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
45	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
46	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
47	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan	Predikat	Zona Hijau

48	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
49	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
50	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
51	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat DaerahIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.807.027.460,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	189.460.000,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	580.000.000,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.402.000.000,00	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.944.981.821,00	APBD

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.878.576,00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.719.850.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		20.467.804.569,00	APBD

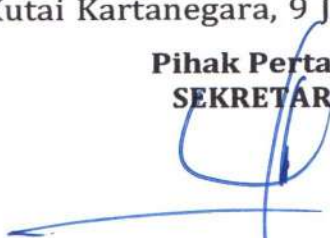
**Pihak Kedua,
KEPALA,**



H. HAMLY, SE
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196404091988031013

Kutai Kartanegara, 9 Januari 2024

**Pihak Pertama,
SEKRETARIS,**



DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZEIN WAHYUDI PASA, SP**
Jabatan : **PERENCANA MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
3. Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
5. Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
6. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
7. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

8. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
9. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
12. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
13. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
14. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

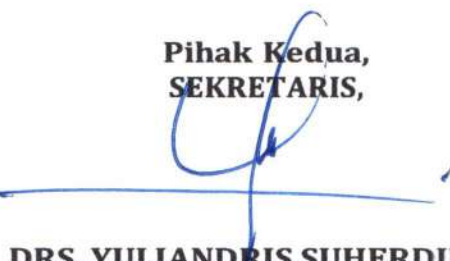
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

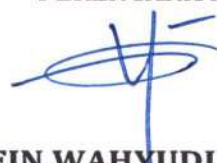
Kutai Kartanegara, 8 Januari 2024

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS,**



DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

**Pihak Pertama,
PERENCANA MUDA**



ZEIN WAHYUDI PASA, SP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197309282001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Analisis Program dan Kegiatan	Laporan Formulasi Sajian Analisis	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen Rencana Kebijakan Strategis Jangka Pendek	Dokumen Rencana Kebijakan Strategis Jangka Pendek	Dokumen	1
3	Tersedianya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Lintas Sektoral	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Lintas Sektoral	Dokumen	1
4	Tersedianya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Sektoral	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Sektoral	Dokumen	1
5	Tersedianya Dokumen Rancangan Anggaran dan Pembiayaan	Dokumen Rancangan Anggaran dan Pembiayaan	Dokumen	1
6	Tersedianya Laporan Telaahan Hasil Pembahasan Anggaran	Laporan Telaahan Hasil Pembahasan Anggaran	Laporan	1
7	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Laporan	1

**TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB PENYUSUNAN PROGRAM
DAN KEUANGAN**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12
3	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.106
4	Tersedianya Laporan Keuangan Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12
5	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
6	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
7	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100

8	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat Kepatuhan Waktu Input E-Pantau dan Telah di Verifikasi 100 % per Tanggal 10 Setiap Bulan	Persen	100
10	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standard Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
14	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100

18	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
24	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
25	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	APBD
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.482.027.460,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	325.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		12.307.027.460,00	APBD

Kutai Kartanegara, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PERENCANA MUDA


ZEIN WAHYUDI PASA, SP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197309282001121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SERAPUL ANAM,SE,MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

3. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
4. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

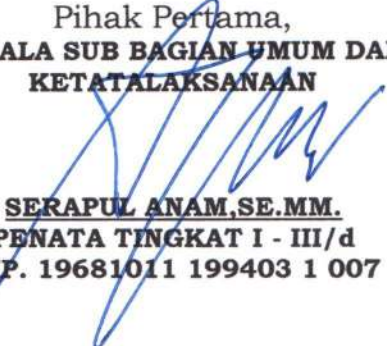
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
PEMBINA. TK. I
NIP.19680708 1994903 1 013

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN**


SERAPUL ANAM, SE.MM.
PENATA TINGKAT I - III/d
NIP. 19681011 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dukomen	Laporan	4
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dukomen	Laporan	4
3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
4	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dukomen	Paket	157
5	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dukomen	orang	15
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Layanan	Paket	5
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan	Paket	20
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Junlah Layanan	Paket	3
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Layanan	Paket	4
11	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Layanan	Paket	10
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan	Laporan	200
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Layanan	Dukomen	500
14	Dukungan Peleaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Layanan	Dukomen	3
15	Pengadaan Mobil	Jumlah Persen	Unit	215
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persen	Unit	200
15	Penyediaan JasaSurat Menyurat	Jumlah Bulan	Laporan	3
16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	Laporan	12
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	Laporan	12
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Persen	Unit	7

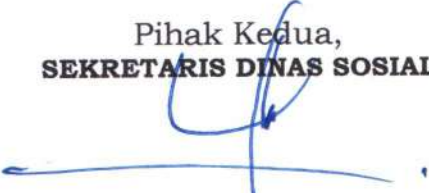
19	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Persen	Unit	29
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persen	Unit	78
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Persen	Unit	5
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Persen	Bulan	41
23	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dukomen	Dukomen	2
24	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan	Makam Pahlawan	2
25	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
26	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
27	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

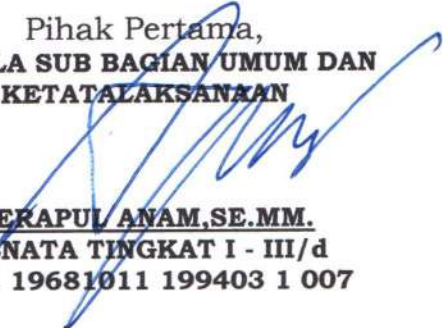
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	89.460.000	APBD
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	APBD
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	APBD
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	280.000.000	APBD
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Udangan	200.000.000	APBD
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	60.000.000	APBD
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.000.000	APBD
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	APBD
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	295.000.000	APBD
10	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000	APBD
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	APBD
12	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	250.000.000	APBD
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	APBD
14	Pengadaan Mabel	540.832.000	APBD
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.404.149.821	APBD
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	APBD
16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	316.485.288	APBD
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969.393.288	APBD
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.000.000	APBD
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	300.000.000	APBD
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	APBD
21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	1.500.000.000	APBD
22	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	374.850.000	APBD
23	Rehabilitas Saran dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.350.000.000	APBND
24	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		10.580.170.397	

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL


Drs. YULIANDRIS/SUHERDIMAN
PEMBINA. TK. I
NIP.19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN**


SERAPUL ANAM, SE.MM.
PENATA TINGKAT I - III/d
NIP. 19681011 199403 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd. Ery Faisyal, S.Sos., M.Si
Jabatan : Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Yuliandris Suherdian
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
4. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
5. Membuat Rumusan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur Perangkat Daerah;
6. Menganalisis Sumber Daya Manusia Aparatur Perangkat Daerah;
7. Membuat Rumusan Pengembangan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur Perangkat Daerah;
8. Melaksanakan Evaluasi Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan Penyusunan sarana kebijakan dalam sistem Sumber Daya Manusia Aparatur Perangkat Daerah;
10. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan urusan Kepegawaian Perangkat Daerah;
11. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
12. Melaksanakan Manajemen Resiko program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan Kepegawaian Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
16. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

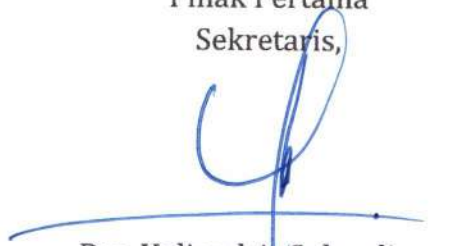
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama
Sekretaris,



Drs. Yuliandris/Suherdiman
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis SDM Aparatur
Ahli Muda,



Mohd. Ery Faisyal, S.Sos., M.Si
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19790516 200112 1 001

15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun Berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
25	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75

8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap Tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap Tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100

28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan Pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100

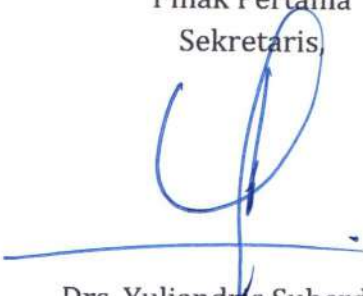
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

TUGAS SEBAGAI ANALIS SUMBER DAYA APARATUR AHLI MUDA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Dokumen	29
2	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi proses kenaikan pangkat ASN	Dokumen	10
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Proses update dan verifikasi data ASN pada aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dan SiASN	Aplikasi	2
4	Terlaksananya Proses Administrasi Pensiun ASN	Jumlah ASN Pensiun dan Taperan ASN yang terlayani	Dokumen	6
5	Terlaksananya Proses Administrasi Cuti ASN	Jumlah Administrasi Kepegawaian Cuti ASN yang terproses	Dokumen	40
6	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannnya Administrasi Kepegawaian Rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Kehadiran (Absensi) Perangkat Daerah	Dokumen	25
7	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya dan tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Peta Jabatan Perangkat Daerah	Dokumen	2
8	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menganalisis, Menyusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK)	Dokumen	1
9	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan	Laporan	2
10	Terlaksannnya Tata Kelola Arsip pada Sub Bagian Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Arsip pada Sub Bagian Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Arsip	130
11	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dokumen	Jumlah Dokumen SK, Rekomendasi dan Nota Dinas terproses	Dokumen	25

	SK, Rekomendasi dan Nota Dinas			
12	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi E-Pantau Sub Bagian Kepegawaian	Persen	100
13	Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi dan Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK Perangkat Daerah	Persen	100
14	Tesusunnya Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Kepegawaian	Dokumen	1

Pihak Pertama
Sekretaris,



Drs. Yuliandris Suherdiman

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680708 199403 1 013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024
Pihak Kedua,
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Muda



Mohd. Ery Faisyal, S.Sos., M.Si

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19790516 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAWADI, S.Sos
Jabatan : Kepala UPT Loka Bina Karya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HAMLY, SE
Jabatan : Kepala DINAS SOSIAL KAB. KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

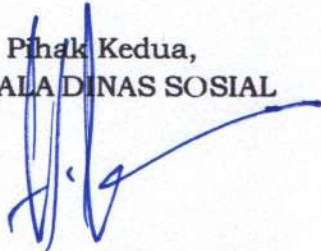
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
16. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
18. Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL



HAMLY, SE
Pembina Tingkat I (IV /b)
NIP. 196404091988031013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala UPT Loka Bina Karya



JAWADL, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196607101991121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUN DWI ROHMANI, S.Sos

Jabatan : Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HAMLY, SE

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
16. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
18. Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

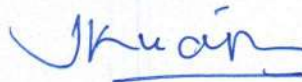
Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL



HAMLY, SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196404091988031013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala UPTD Pelayanan Sosial
Asuhan Anak



KUN DWI ROHMANI, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196802271994022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIWIEK WIDYANINGSIH, S.IK, Humas**

Jabatan : **KASUBAG TU UPTD. PSAA. ODAH NGASOH KANAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KUN DWI ROHMANI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA UPTD. PSAA. ODAH NGASOH KANAK**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
3. Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, perencanaan kegiatan, ketata usahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan UPTD;
4. Terlaksananya administrasi kegiatan rutin dan administrasi perjalanan dinas, surat tugas, nota dinas, dan bimtek;
5. Menyiapkan administrasi pembinaan, pengembangan, dan perberdayaan sumber daya UPTD;
6. Tersedia nya laporan bulanan dan tahunan;
7. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
8. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";

9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
10. Tercapainya Kinerja Urusan Pemerintahan;
11. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
12. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di UPTD. PSAA. Odah Ngasoh Kanak;
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan dipertanggung jawabkan.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD. PSAA. ODAH
NGASOH KANAK**



KUN DWI ROHMANI, S.Sos
Penata Tk. I - III/d
NIP. 19681221 200312 1 002

Pihak Pertama,
**KASUBAG TU UPTD. PSAA. ODAH
NGASOH KANAK**



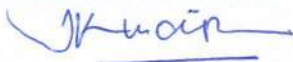
WIWIEK WIDYANINGSIH, S.IK, Humas
Penata Tk. I - III/d
NIP. 19780907 201101 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

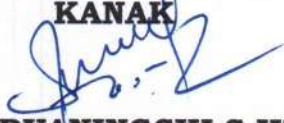
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya pengadministrasi penanganan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar	Persentase penanganan kebutuhan dasar anak terlantar	Persen	100
2	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan	Persen	100
3	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan	Jumlah data kepegawaian yang lengkap dan akurat	Persen	100
4	Terlaksananya pengelolaan naskah tata dinas yang masuk dan keluar serta arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku	Jumlah catatan dan arsip dokumen naskah dinas yang rapi dan sesuai ketentuan	Persen	100

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD.PSAA.ODAH
NGASOH KANAK**


KUN DWI ROHMANI,S.Sos
Penata Tk. I - III/d
NIP. 19681221 200312 1 002

Pihak Pertama,
**KASUBAG TU UPTD. PSAA. ODAH NGASOH
KANAK**


WIWIEK WIDYANINGSIH,S.IK,Humas
Penata Tk. I - III/d
NIP. 19780907 201101 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. HAMLY, SE
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
8. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
10. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
12. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
13. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

14. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
17. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
18. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

H. HAMLY, SE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640409 199803 1 013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024
Pihak Kedua,
PLT. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
SOSIAL

DRS. YULIANDRI SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680708 199403 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah	50
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	60
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	20
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	237
		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	5
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah	2
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	2

4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
5	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
6	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
7	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap Tahun	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
10	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100

11	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
14	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap Tahun	Persen	100
16	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100

17	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
18	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
19	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun Berjalan	Persen	100
20	Penerapan Core Value ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
21	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
22	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
23	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
24	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
25	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
26	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
27	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100

28	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
29	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
30	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
31	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan Pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
32	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
33	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
34	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
35	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
36	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
37	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
38	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
39	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64

40	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
41	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
42	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
43	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
44	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
45	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
46	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	APBD
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	7.739.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		7.814.000.000	APBD

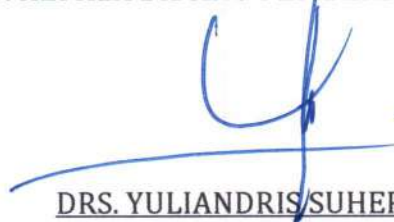
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



H. HAMLY, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640409 199803 1 013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
PLT. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



DRS. YULIANDRIS/SUHERDIMAN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRA. HJ. RUSMINAH
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
8. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
10. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
12. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;

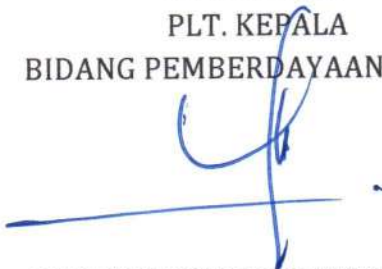
13. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
14. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
17. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
18. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
PLT. KEPALA
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL
AHLI MUDA


DRA. HJ. RUSMINAH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19670512 199002 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap Tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap Tahun	Persen	100

13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun Berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
25	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan Pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6

35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

**TUGAS SEBAGAI PENYULUH SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya program penyuluhan sosial	Jumlah Laporan penyuluhan sosial yang terlaksana	Jumlah	1
2	Tersusunya program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun	Jumlah	7

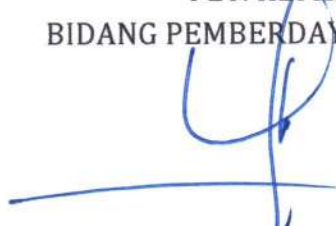
3	Terlaksannya program kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan social	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terlaksanan	Jumlah	3
4	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang	Jumlah kebijakan administrasi Bidang	Jumlah	3

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	APBD
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000	APBD
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.739.000.000	APBD
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		7.739.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
PLT. KEPALA
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL
AHLI MUDA


DRA. HJ. RUSMINAH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19670512 199002 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SAFITRI RAMDHANI, SE., M.Si
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
8. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
10. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
12. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap Tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap Tahun	Persen	100

13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun Berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

**TUGAS SEBAGAI PENYULUH SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

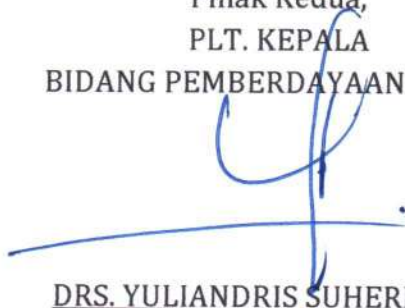
NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya program penyuluhan sosial	Jumlah Laporan penyuluhan sosial yang terlaksana	Laporan	1
2	Tersusnya program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun	Jumlah	7

3	Terlaksannya program kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan sosial	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terlaksanan	Jumlah	3
4	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang	Jumlah kebijakan administrasi Bidang yang tersusun	Jumlah	3

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	75.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		75.000.000	APBD

Pihak Kedua,
PLT. KEPALA
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680708 199403 1 013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL
AHLI MUDA



ADI SAFITRI RAMDHANI, SE., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19790817 200112 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRI, SE
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
8. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
10. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
12. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;

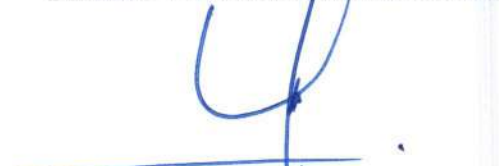
13. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
14. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
17. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
18. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama
PLT. KEPALA
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


DRS. YULINDRI SUHERDIMAN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL
AHLI MUDA


YUSRI SE
Penata (III/c)
NIP. 19790416 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap Tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap Tahun	Persen	100

13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun Berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
25	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan Pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6

35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

**TUGAS SEBAGAI PENYULUH SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya program penyuluhan sosial	Jumlah Laporan penyuluhan sosial yang terlaksana	Jumlah	1
2	Tersusnya program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun	Jumlah	7

3	Terlaksannya program kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan sosial	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terlaksanan	Jumlah	3
4	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang	Jumlah kebijakan administrasi Bidang yang tersusun	Jumlah	3
5	Terlaksannya dan terkoordinasinya Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember	Jumlah peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember yang terlaksana	Jumlah	1
6	Terlaksananya dan terkoordinasinya peringatan hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) 20 Desember	Jumlah Peringatan Hari Kesetiakawan Nasional (HKSN) 10 Nopember yang terlaksana	Jumlah	1

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	
2	-	-	
3	Dst.	-	
JUMLAH ANGGARAN		-	

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Pertama
PLT. KEPALA
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

DRS. YULINDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL
AHLI MUDA

YUSRI SE

Penata (III/c)
NIP. 19790416 200701 1 016



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARKO, SST., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. HAMLY, SE
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada Perjanjian Kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai KARTanegara Tahun 2021-2026 pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat Daerah;

9. Terealisasinya Output Kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN "Ber-AKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
15. Tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal;
16. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
18. Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial,



H. Hamly, SE

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19640409 198803 1 013

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



Sunarke, SST., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19710907 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lajut Usia Terlanta serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	Persen	100
2	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Persen	100
3	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Persentase pihak yang terkait dalam proses pemulangan Warga Negara Korbn Tindak Kekerasan ke tempat asalnya	Persen	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	79
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
		Tingkat kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
6	Meningkatnya pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi jabatan	Persentase keterisian data di aplikasi datu data Kukar	Persen	100

7	Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang	Capaian output kegiatan	Persen	100
8	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
9	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan	Laporan penyusunan manajemen resiko dan laporan pengendalian manajemen resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
10	Melakukan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
11	Melaksanakan Tata Kelola Core Value ASN "Ber-AKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	4
12	Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100
13	Tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
14	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
15	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten	Penurunan prevalensi Stunting	Persen	16,5
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasidi Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;	100.000.000,00	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangDisabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar sertaGelandangan Pengemis di luar panti sosial;	5.144.089.590,00	APBD
3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	715.000.000,00	APBD

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial,

H. Hamly, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640409 198803 1 013

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

Sunarko, SST., M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19710907 199401 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUCY YULIDASARI, M. Psi

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUNARKO, SST.,M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
16. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
18. Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL


SUNARKO, S.ST., M.Si
Pembina (IV /a)
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Muda


LUCY YULIDASARI, M. Psi
Penata Muda Tk.I
NIP. 197507172008012028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO, S.Hut
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
5. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN



RIADI HADIWINOTO, S.Hut
Pembina / IV a
NIP. 19681221 200312 1 002

Kutai Kartanegara, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL
AHLI MUDA



AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si
Penata Tk. I / III d
NIP. 19810813 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	97
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap Tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksannnya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap Tahun	Persen	100

13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun Berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
25	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan Pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6

35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

**TUGAS SEBAGAI PENYULUH SOSIAL
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN**

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya program penyuluhan sosial	Jumlah Laporan penyuluhan sosial yang terlaksana	Laporan	1
2	Tersusunnya program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Penanganan Fakir Miskin	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun	Dokumen	2
3	Terlaksannya program kegiatan dan sub kegiatan bidang Penanganan Fakir Miskin	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terlaksanan	Dokumen	2
4	Tersedianya Laporan Finalisasi Data Terpadu	Jumlah Laporan Finalisasi Data Terpadu	Laporan	1
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan	Laporan	1
6	Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi(TUSI) bidang	Jumlah perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi(TUSI) bidang	Rapat	2

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	
2	-	-	
3	Dst.	-	
JUMLAH ANGGARAN		-	

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN



RIADI HADIWINOTO, S.Hut
Pembina / IV a
NIP. 19681221 200312 1 002

Kutai Kartanegara, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL
AHLI MUDA



AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si
Penata Tk.I / III d
NIP. 19810813 200604 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL KELUARGA DINAS
SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHAMDI,SE**

Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR**
JAMINAN SOSIAL KELUARGA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HJ.SUHARNINGSIH.SH.MM.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Program Keluarga Harapan.
2. Menganalisa materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi penerima program keluarga sejahtera, Program Kesehatan dan Program Keluarga Harapan.
3. Mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penerima program keluarga sejahtera, Program Jaminan Kesehatan program keluarga harapan.
4. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Program Keluarga Harapan.
5. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat.
6. Menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan, bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima

program keluarga sejahtera program jaminan Kesehatan dan program keluarga harapan.

7. Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial;
8. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) dan rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya.
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
10. Melaksanakan tata Kelola Arsip perangkat daerah.
11. Melakukan Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

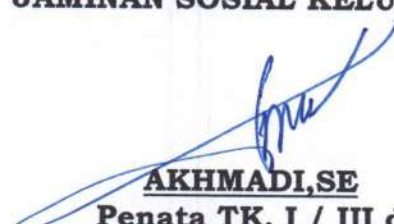
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**


HJ. SUHARNINGSIH.SH.MM
Pembina / IV a
NIP. 19690108 199403 2 005

Pihak Pertama,
**PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SEKSI
JAMINAN SOSIAL KELUARGA**


AKHMADI, SE
Penata TK. I / III d
NIP. 19721515 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Presentase terlaksananya Kegiatan Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	Persen	100
2	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang yang mendapat bantuan Sosial keluarga	orang	1.914
3	Mengumpulkan dan Menghimpun Data satuan bagi Veteran dan janda Veteran	Jumlah Veteran dan janda veteran yang mendapatkan satuan	orang	101
4	Mengumpulkan dan Menghimpun Data satuan bagi Warga miskin	Jumlah orang yang menerima satuan bantuan sosial (Lansia Terlantar anak Terlantar dan penyandang Disabilitas	orang	1.914

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL KELUARGA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Presentase terlaksananya Kegiatan Perlindungan bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100

2	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sosial di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat bantuan Sosial keluarga	orang	2.483
3	Mengumpulkan dan Menghimpun Data satuan bagi Veteran dan janda Veteran Kabupaten/Kota	Jumlah Veteran dan janda veteran yang mendapatkan satuan	orang	101
4	Mengumpulkan dan Menghimpun Data satuan bagi Warga miskin	Jumlah orang yang menerima satuan bantuan sosial (Lansia Terlantar anak Terlantar dan penyandang Disabilitas	orang	1900

ROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL KELUARGA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	RP.7.943.600.000.	APBD
JUMLAH ANGGARAN		RP.7.943.600.000.	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**


HJ.SUHARNINGSIH.SH.MM
Pembina / IV a
NIP. 19690108 199403 2005

Pihak Pertama,
**PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL
KELUARGA**


AKHMADI,SE
Penata TK. I / III d
NIP. 1972 1215 200902 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHD. ERWINSYAH, SE**

Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. SUHARNINGSIH, SH, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;
2. Melakukan kegiatan profesional pelayanan profesi Pekerja Sosial di masyarakat;
3. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**


Hj. SUHARNINGSIH, SH, MM
PEMBINA / IVa
NIP. 19690108 199403 2 005

Pihak Pertama,
**PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
SUB KOORD PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA**


MOHD. ERWINSYAH, SE
PENATA TK I / IIIa
NIP. 19821215 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100
1.	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Korban Bencana Agar Sesuai demi Kelancaran dan Terlaksananya Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa	Orang	1.500
2.	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Korban Bencana Agar Sesuai demi Kelancaran Terlaksananya Penyediaan Sandang Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa	Orang	1.500
	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100
1.	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Lokasi Yang Sesuai demi Kelancaran dan Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi, Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi	Lokasi	6

2.	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Anggota TAGANA Kab.Kutai Kartanegara Yang Aktif demi Kelancaran dan Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi, Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA	Orang	24
----	--	---------------	-------	----

**TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA**

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100
1.	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Korban Bencana Agar Sesuai demi Kelancaran dan Terlaksananya Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa	Orang	1.500
2.	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Korban Bencana Agar Sesuai demi Kelancaran Terlaksananya Penyediaan Sandang Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa	Orang	1.500

	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100
1.	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Lokasi Yang Sesuai demi Kelancaran dan Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi, Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi	Lokasi	6
2.	Mengumpulkan dan Menghimpun Data Anggota TAGANA Kab.Kutai Kartanegara Yang Aktif demi Kelancaran dan Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi, Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA	Orang	24

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan Makanan	300.000.000,-	APBD
2.	Penyediaan Sandang	250.000.000,-	APBD
3.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100.000.000,-	APBD
4.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	400.000.000,-	APBD

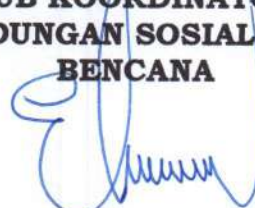
Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**



Hj. SUHARNINGSIH, SH, MM
PEMBINA / IVa
NIP. 19690108 199403 2 005

Pihak Pertama,
**PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA**



MOHD. ERWINSYAH, SE
PENATA TK I / III d
NIP. 19821215 200212 1 003